BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

3.1.1 Gambaran Umum Uni Eropa

Uni Eropa (UE) adalah organisasi internasional negara-negara Eropa yang dibentuk untuk meningkatkan integrasi ekonomi dan memperkuat hubungan antara negara-negara anggotanya. Kantor utamanya berada di Brussels, Belgia dan beranggotakan 28 negara padatahun 2013. Dalam buku Aelina Surya "Hubungan Internasional di Kawasan Eropa Antara Konflik, Kerjasama dan Integrasi", dijelaskan bagaimana proses integrasi yang telah dilalui oleh negara-negara di Eropa dalam menyatukan sebuah kepentingan nasional menjadi kepentingan bersama dalam sebuah organisasi di kawasan yang tak lain *European Union* (EU) yang dimana dalam buku ini dipaparkan bagaimana hambatan-hambatan yang harus dihadapi oleh Uni Eropa. Uni Eropa dibentuk pada 1 Nopember 1993. Namun Uni Eropa tidak terbentuk begitu saja, organisasi ini berasal dari sebuah organisasi *European Coal and Steel Community* (ECSC) Tahun 1950, Menteri Luar Negeri Perancis Robert Schumann atas saran dari Jean Monnet mengajukan sebuah ide untuk integrasi Perancis dan Jerman dalam industri baja dan batu bara dan mengundang negara lain untuk ikut bergabung.

Setelah berkembang selama 50 tahun atau setengah abad, Uni Eropa kini menjadi contoh yang paling sukses dari integrasi kawasan di Dunia. Sasaran utama didirikannya Uni Eropa adalah berharap menghindari perang dan

mengukuhkan perkembangan demokrasi. Integrasi Uni Eropa secara keseluruhan pada dasarnya mempunyai tiga pilar, masing-masing adalah Integrasi Ekonomi, urusan dalam negeri dan yuridiksi kebijakan keamanan dan diplomasi bersama (Surya, 2009:136).

3.1.1.1 Sejarah Integrasi Uni Eropa

A. *Treaty of Paris* (Perjanjian Paris)

Proses integrasi Eropa bermula dari dibentuknya "Komunitas Batu Bara dan Baja Eropa/*European Coal and Steel Community* (ECSC)", yang traktatnya (perjanjiannya) ditandatangani pada tanggal 18 April 1951 di Paris dan berlaku sejak 25 Juli 1952 sampai tahun 2002. Tujuan utama Perjanjian ECSC adalah penghapusan berbagai hambatan perdagangan dan menciptakan suatu pasar bersama dimana produk, pekerja dan modal dari sektor batu bara dan baja dari negara-negara anggotanya dapat bergerak dengan bebas. Perjanjian ini ditandatangani oleh Belanda, Belgia, Italia, Jerman, Luxemburg dan Perancis. Hasil utamnya adalah pembentukan lembaga *European Coal and Steel Community* (ECSC), serta penghapusan rivalitas lama antara Jerman dan Perancis, dan memberi dasar bagi pembentukan "Federasi Eropa" (Rubin, 2003:75).

B. *Treaty of Rome* (Perjanjian Roma)

Pada tanggal 1-2 Juni 1955, para menteri luar negeri 6 negara penandatanganan Perjanjian ECSC bersidang di Messina, Italia. Dan memutuskan untuk memperluas integrasi Eropa kesemua bidang ekonomi. Berikutnya pada

tanggal 25 Maret 1957 di Roma ditandatangani *European Atomic Energy Community* (EAEC), lebih popular disebut dengan Euratom. Keduanya mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1958. Jika ECSC dan Euratom merupakan perjanjian yang spesifik, detail dan mengikat secara hukum, maka Perjanjian EEC lebih merupakan sebuah perjanjian kerangka kerja (*Framework Treaty*).

Tujuan utama Perjanjian Masyarakat Ekonomi Eropa/*European Economic Community* (EEC) adalah penciptaan suatu pasar bersama diantara negara-negara anggotanya melalui pencapaian suatu Persekutuan Beacukai/*Customs Unions* (CU) yang di satu sisi melibatkan penghapusan Bea Pabean/*Customs Duties* (CD), kuota impor dan berbagai hambatan perdagangan lain di antara negara anggota, berikut disisi lainnya memberlakukan suatu *Common Customs Tariff* (CCT) atau Tarif Bea masuk keluar barang dan jasa terhadap negara ketiga (non-anggota).

Implementasi, inter alia tersebut diatas dilakukan melalui harmonisasi kebijakan-kebijakan nasional negara anggota, dengan menerapkan prinsip 4 *freedom of movement*, yaitu bebasnya 4 hal penting untuk keluar masuk negara-negara anggotanya yaitu; barang, jasa, pekerja dan modal.

Ketiga organ tersebut di atas; yaitu Komunitas Batu Bara dan Baja Eropa/*European Coal and Steel* Community (ECSC), Komunitas Energi Atom Eropa/*European Atomic Energy community* (EAEC), dan Masyarakat Ekonomi Eropa/*European Economic* Community (EEC) tersebut masing-masing memiliki organ eksekutif yang berbeda-beda. Namun sejak 1 Juli 1967 dibentuk suatu Dewan atau suatu Komisi untuk lebih memudahkan manajemen kebijakan bersama yang semakin luas, dimana Komisi Eropa mewarisi wewenang ECSC

High Authority, EEC *Commision* dan Euratom *Commision*. Sejak saat itu ketiga komunitas tersebut dikenal sebagai *European Communities* (EC). Berikutnya melalui pertemuan 1 Juli 1967 tersebut juga disepakati pembetukan Dewan Menteri Uni Eropa (UE), yang menggantikan *special Council of Ministers* di ketiga komunitas, dan melambangkan "Rotating Council Presidency" untuk masa jabatan selama 6 bulan, dan membentuk Badan Audit Masyrakat Eropa, menggantikan Badan-badan Audit ECSC, Euratom dan EEC (Rubin, 2002:78).

C. *Schengen Agreement* (Perjanjian Schengen)

Pada tanggal 14 Juni 1985, Belanda, Belgia, Jerman, Luxemburg, dan Perancis menandatangani *Schengen Agreement*, dimana mereka sepakat untuk secara bertahap menghapuskan pemeriksaan di perbatasan mereka dan menjamin pergerakan bebas manusia, baik warga negara mereka maupun warga negara lain. Perjanjian ini kemudian diperluas dengan memasukkan Italia (1990), Portugal dan Spanyol (1991), Yunani (1992), Austria (1995), Denmark, Finlandia, Norwegia dan Swedia (1996) (Rubin, 2002:80).

D. *Single Act, Brussels,* 1987

Berdasarkan buku putih (*White Paper*) yang disusun oleh Komisi Eropa dibawah kepemimpinan Jacques Delors pada tahun 1984, Masyrakat Eropa mencanangkan pembentukan sebuah pasar tunggal Eropa. *Single European Act*, yang ditandatangani pada bulan Februari 1986, dan mulai berlaku tanggal 1 Juli 1987, terutama ditujukan sebagai suplemen perjanjian MEE. Tujuan utama *Single*

Act adalah pencapaian pasar internal yang ditargetkan untuk dicapai sebelum 31 Desember 1992. Single Act ini mengatur beberapa hal berikut:

a. Melembagakan pertemuan reguler antara Kepala negara dan/atau Pemerintahan negara anggota Masyarakat Eropa, yang bertemu paling tidak setahun dua kali, dengan dihadiri oleh Presiden Komisi Eropa.
b. *European Political Cooperation* secara resmi diterima sebagai forum koordinasi dan konsultasi antara pemerintah.
c. Seluruh persetujuan Asosiasi dan Kerjasama serta perluasan Masyarakat Eropa harus mendapat persetujuan Parlemen Eropa (Luhulima, 2002:47).

E. *Treaty of Maastricht* (Perjanjian Maastricht), 1992

Treaty on European Union (TEU) yang ditandatangani di Masstricht pada tanggal 7 Februari 1992 dan mulai berlaku tanggal 1 November 1993, mengubah *European Comunity* (EC) menjadi *European Union* (EU). TEU mencakup, memasukkan dan memodifikasi perjanjian-perjanjian terdahulu (ECSC, Euratom dan EEC). Jika *Treaties Establishing European Community* (TEEC) memiliki karakter integritas dan kerjasama ekonomi yang sangat kuat, maka TEU menambahkan karakter lain yaitu kerjasama dibidang *Common Foreign and Security Policy* (CFSP) dan *Justice and Home Affairs* (JHA). Perjanjian ini mengatur beberapa hal berikut, tiga pilar kerjasama UE, yaitu:

1. Pilar 1: Masyarakat Eropa/*European Communities* (EC)
2. Pilar 2: Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Bersama/*Commons Foreign and Security Policy* (CFSP)

3. Pilar 3: Hukum dan Negeri/*Justice and Home Affairs* (JHA)
    a. Memberi wewenang yang lebih besar kepada Parlemen Eropa untuk ikut memutuskan ketentuan hukum UE melalui mekanisme prosedur keputusan bersama (*Co-decision Procedure*), dimana bidang yang masuk dalam prosedur tersebut adalah: pergerakan bebas pekerja, pasar tunggal, pendidikan, penelitian, lingkungan, Jaringan Lintas Eropa/*Trans European Network* (TEN), kesehatan, budaya dan perlindungan konsumen.
    b. Memperpanjang masa jabatan Komisioner menjadi 5 tahun (sebelumnya 2 tahun) dan pangkatnya harus mendapatkan persetujuan Parlemen.
    c. Memperkenalkan prinsip subsidiarity, yaitu membatasi wewenang institusi UE agar hanya menangani masalah-masalah yang memang lebih tepat dibahas di level UE (Geary, 2013:20).

F. *Treaty of Amsterdam* (Perjanjian Amsterdam)

Pada pertemuan tanggal 17 Juni 1997 di Amsterdam, *European Council* (Para Kepala Negara dan Pemerintahan ke-15 negara anggota EU) merevisi TEU dan menghasilkan sebuah perjanjian baru. *The Treaty of Amsterdam* memiliki empat tujuan utama yaitu:

i. Memprioritaskan hak-hak warga negara dan penyedia lapangan kerja. Meskipun penyedia lapangan kerja tetap merupakan kewajiban utama pemerintah nasional, Perjanjian Amsterdam menekankan perlunya usaha bersama seluruh negara anggota untuk mengatasi pengangguran, yang dianggap sebagai problem utama Eropa saat ini.

ii. Menghapuskan hambatan terakhir menuju *freedom of movement* dan memperkuat keamanan, dengan meningkatkan kerjasama negara anggota di bidang *Justice and Home Affairs*.

iii. Memberi UE suara yang lebih kuat di dunia internasional dan menunjuk seorang *High Representative* untuk *Commons Foreign and Security Policy*.

iv. Membuat struktur institusi UE lebih efisien, terutama berkaitan dengan perluasan keanggotaan ke-6.

Salah satu kritik yang sering dialamatkan pada berbagai perjanjian mengenai UE adalah teks yang rumit dan sangat teknokratis. Hal tersebut membuat perjanjian dasar UE sulit di baca dan di mengerti, yang pada gilirannya juga dapat memperlemah dukungan publik terhadap proses integrasi Eropa. Perjanjian Amsterdam merupakan jawaban terhadap kritikan tersebut karena perjanjian ini memasukan TEU dan TEEC, dengan penomoran baru pasal-pasalnya untuk lebih memudahkan pemahaman terhadap perjanjian UE. Perjanjian secara khusus mengatur hal-hal berikut:

i. Memberi wewenang Dewan Menteri untuk menjatuhkan hukuman pada negara-negara anggota (dengan mencabut sementara beberapa hak mereka, termasuk hak *voting*) jika negara tersebut melakukan pelanggaran HAM.

ii. Menyediakan kemunkinan dilakukannya *Enchanced Cooperation*, yaitu: beberapa negara anggota (minimal delapan negara) dapat melakukan suatu kerjasama meskipun tidak semua negara anggota lainnya menyetujuinya. Negara yang tidak (atau belum) menyetujui kerjasama tersebut dapat

bergabung di kemudian hari. Salah satu contohnya adalah bentuk-bentuk kerjasama dalam kerangka CFSP.

iii. Memasukan *Schengen Agreement* dalam TEU (dengan pilihan *opt-out* atau hak untuk tidak memilih bagi Inggris dan Irlandia).

iv. Menjadikan asylum, visa dan imigrasi sebagai kebijakan bersama (kecuali bagi Inggris dan Irlandia). Dalam waktu lima tahun, negara-negara anggota dapat memutuskan apakah akan menggunakan mekanisme *qualified majority voting* atau tidak (Geary, 2013:20).

G. *Treaty of Nice* (Perjanjian Nice, Paris)

Pertemuan *European Council* tanggal 7-9 Desember 2000 di Nice mengadopsi sebuah traktat baru yang membawa perubahan bagi empat masalah institusional: komposisi dan jumlah komisioner di komisi Eropa, bobot suara di Dewan Uni Eropa, mengenai *unamity* dengan *qualified majority* dalam proses pengambilan keputusan dan pengkokohan kerjasama. Perjanjian ini walaupun disepakati pada tahun 2000, tetapi baru mulai berlaku tanggal 1 Februari 2003.

Perjanjian ini mengatur beberapa hal berikut:

a. Dengan memperhatikan perluasan anggota EU, membatasi jumlah anggota Parlemen maksimal 732 orang dan sekaligus memberi alokasi jumlah kursi tiap negara anggota (sudah termasuk negara anggota baru).

b. Mengganti mekanisme pengambilan keputusan bagi 30 pasal dalam TEU yang sebelumnya menggunakan *unanimity* dan diganti dengan menggunakan mekanisme *qualified majority voting*.

c. Mengubah bobot suara negara-negara anggota EU mulai 1 Januari 2005 (sudah termasuk negara-negara anggota baru).
d. Mulai 2005 membatasi jumlah komisioner, 1 komisioner tiap 1 negara, dan batas maksimum jumlah komisioner akan ditetapkan setelah EU beranggotakan 28 negara, serta memperkuat posisi Presiden Komisi.
e. Memberi dorongan bagi terselenggaranya Konvensi Masa Depan Eropa, yang digunakan sebagai persiapan bagi penyelenggaraan *Intergovemental Conference* di tahun 2003 (Geary, 2013:20).

3.1.1.2 Tugas dan Fungsi Organ-organ Uni Eropa

Uni Eropa atau *European Union* (EU) merupakan sebuah organisasi antar pemerintahan dan supranasional di daratan Eropa. Organisasi yang sampai saat ini beranggotakan 28 negara resmi berdiri sejak ditandatanganinya Perjanjian Uni Eropa atau Perjanjian *Maastricht* tahun 1992. Uni Eropa juga telah dikenal sebagai organisasi regional yang paling kuat, bahkan sebagai organisasi internasional yang memiliki kekuatan supranasional terhadap negara anggotanya, memiliki tata pemerintahan sendiri yang terdiri dari berbagai institusi pelaksana dalam menjalankan peran Uni Eropa di kawasan Eropa serta negara dunia ketiga. Adapun Tugas dan Fungsi Uni Eropa yang tertera dalam sebuah organ-organ Uni Eropa itu sendiri sebagai berikut:

A. Parlemen Eropa/*European Union Parliamen*t (EUP)

Parlemen Eropa berkedudukan di Strasbourg (Perancis), Brussel dan Luxemburg. Parlemen Eropa pada dasarnya memiliki empat fungsi penting yaitu:

1. Parlemen berbagi kekuatan dengan Dewan dalam bidang legislatif untuk membentuk hukum dan peraturan-peraturan Uni Eropa.
2. Parlemen berbagi kekuasaan dengan Dewan dalam bidang anggaran sehingga dapat menerima atau menolak anggaran serta dapat mempengaruhi pengeluaran dan kebijakan Uni Eropa.
3. Parlemen juga menjalankan pengawasan terhadap komisi, memberikan persetujuan dalam pencalonan anggota komisi dan berhak untuk melakukan pengawasan politis atas semua institusi atau lembaga.
4. Parlemen Eropa juga berwenang mengusulkan persidangan *Court of Justice,* menerima petisi dari warga secara individu maupun kelompok (http://www.europa.eu./institutions/inst/parliament/index_en.htmm.diakses 22 Maret 2014).

B. Dewan Uni Eropa/*Council of the European Union* (CEU)

Dewan Uni Eropa merupakan lembaga utama yang bertugas menetapkan perangkat Uni Eropa, atas usulan Komisi, dalam bentuk ketentuan dan keputusan. Keanggotaan Dewan Uni Eropa terdiri dari perwakilan dari negara-negara anggota pada tingkat menteri yang melakukan pertemuan secara teratur. Jabatan Presiden Uni Eropa dipegang secara tergulir diantara negara-negara anggota untuk jangka waktu enam bulan sekali yang berlaku sejak 1 Juli diawali dengan Spanyol, sampai seterusnya ke negara-negara anggota sampai Yunani.

Adapun peran Presiden menjadi semakin penting karena tanggung jawab Uni Eropa semakin besar, tugas-tugas Presiden antara lain:

1) Menyelenggarakan dan memimpin seluruh rapat atau pertemuan.
2) Menjabarkan kompromi-kompromi yang layak di terima dan menentukan jalan keluar yang pragmatis terhadap masalah-masalah yang diajukan kepada Uni Eropa.
3) Mengupayakan terjaminnya keselarasan dan kesinambungan dalam pengambilan keputusan.
4) Dewan terdiri dari satu orang menteri dari masing-masing 15 negara anggota. Para menteri yang ikut berpastisipasi dalam pertemuan adalah menteri yang ditentukan berdasarkan topik khusus yang akan dibahas dalam pertemuan tersebut. Dewan ini memiliki anggota yang berbeda pada saat yang berbeda.

   Dewan memiliki beberapa tanggung jawab utama, yaitu :

   a. Merupakan badan legislatif Uni Eropa untuk masalah-masalah Uni Eropa yang cakupannya luas. Dewan melaksanakan kekuatan legislatif tersebut bersama-sama dengan Parlemen Uni Eropa
   b. Mengkoordinasikan kebijakan ekonomi para negara-negara anggota.
   c. Mengadakan, atas nama Uni Eropa, perjanjian-perjanjian internasional dengan satu atau lebih negara anggota organisasi internasional lainnya.

d. Berbagi kekuasaan anggaran dengan Parlemen Eropa.
e. Mengambil keputusan-keputusan yang penting untuk pembentukan dan pelaksanaan kebijakan luar negeri serta keamanan bersama, atas dasar garis-garis yang telah ditetapkan oleh Dewan.
f. Mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas negara anggota dan menetapkan ketentuan-ketentuan dalam kerjasama di bidang kepolisian dan peradilan dalam masalah-masalah kriminal (http://europa.eu/institutions/inst/council/index_en.htm diakses 22 Maret 2014).

C. Komisi Eropa/*European Commision* (EC)

Peran dan kewajiban Komisi Eropa menempatkannya secara strategis pada pusat proses pembuatan kebijaksanaan Uni Eropa. Komisi Eropa pada hakekatnya melaksanakan berbagai tugas sehari-hari dalam UE. Deskripsi klasik mengenai peran dari Komisi Eropa mencakup 3 fungsi utama: memprakarsai rancangan undang-undang, menjadi pelindung perjanjian-perjanjian UE dan melaksanakan kebijaksanaan dan kegiatan UE.

Komisi Eropa terdiri dari anggota-anggota yakni:

a. Dua Perwakilan dari Perancis, Jerman, Italia, Spanyol dan Inggris serta
b. Satu orang perwakilan dari setiap negara anggota lainnya. Presiden Komisi Eropa diangkat dengan persetujuan bersama dari pemerintahan negara-negara anggota, serta harus mendapatkan persetujuan dari Parlemen Eropa. Anggota komisi atau para komisioner lainnya dinominasi oleh pemerintahan negara-

negara anggota setelah berkonsultasi dengan presiden yang baru diangkat dan harus mendapat persetujuan pula oleh parlemen. Para Komisioner Eropa diangkat untuk masa jabatan 5 tahun.

Dengan aneka ragam latar belakang dan pengalaman, para komisioner menjalankan tugas mereka secara independen (tidak tergantung pada pemerintahan nasional mereka) dan bertindak demi kepentingan UE. Komisioner Eropa ini bertemu sekali dalam seminggu untuk menjalankan tugasnya, termasuk menyetujui proposal, mematangkan rencana-rencana kebijaksanaan dan membahas perkembangan berbagai kebijaksanaan yang menjadi prioritas. Komisi Eropa terdiri dari beberapa Direktorat Jenderal. Masing-masing dipimpin oleh seorang direktur jenderal yang melapor kepada seorang komisioner yang memiliki tanggung jawab politis dan operasional dari Direktorat Jenderal tersebut (http://europa.eu/institutions/inst/council/index_en.htm diakses 22 Maret 2014).

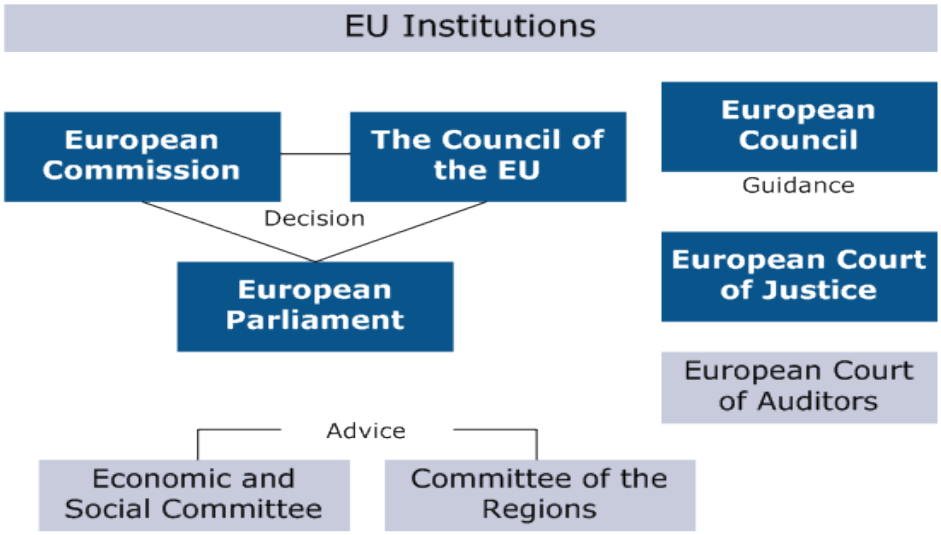
D. Mahkamah Eropa/*The European Court of Justice* (ECJ)

Masyarakat Eropa (sekarang Uni Eropa) menyebutkan bahwa *court of justice*, menjamin kepastian hukum dalam interpretasi dan penerapan traktat. Mahkamah berwenang dalam menangani sengketa antar negara anggota, antara UE dengan negara antar lembaga serta antara indivdu dengan UE. Selain itu, UE juga berwenang untuk memberikan opini terhadap kesepakatan internasional serta *premelinari ruling* yang dibuat untuk kesamaan interpretasi ketentuan UE dan untuk kasus yang belum terselesaikan dan dilimpahkan oleh mahkamah nasional kepada Mahkamah Eropa.

Mahkamah Eropa adalah lembaga yudikatif, berwenang menyelesaikan berbagai konflik kepentingan internal UE dan memberikan opini mengenai berbagai persetujuan internasional yang dilakukan oleh UE. Secara umum tugas Mahkamah Eropa adalah memastikan adanya pemahaman, interpretasi dan aplikasi yang sama dari negara-negara anggota UE terhadap hukum yang berlaku di UE (http://europa.eu/institutions/inst/council/index_en.htm diakses 22 Maret 2014).

E. Badan Pemeriksa Keuangan Eropa/*The European Court of Auditors* (ECA).

Badan Pemeriksa Keuangan Eropa merupakan badan yang membantu Parlemen Eropa dan Dewan Uni Eropa untuk melaksanakan wewenang pengawasan mereka dalam penerapan anggaran. Badan Pemeriksa Keuangan Eropa mempunyai tugas untuk melakukan pemeriksaan apakah semua pemasukan dan pengeluaran keuangan UE dilakukan sesuai ketentuan dan tidak melanggar aturan yang berlaku, serta memastikan apakah manajemen keuangan anggaran UE dilaksanakan secara sehat. Lembaga ini juga dapat melakukan pemeriksaan keuangan atas permintaan dari lembaga lainnya di UE (http://europa.eu/institutions/inst/council/index_en.htm diakses 22 Maret 2014).



Sumber**:** (http://europa.eu/institutions/inst/council/index_en.htm diakses 22 Maret 2014).

Gambar 3.1
Organ-organ Uni Eropa

3.1.1.3 Keanggotaan Negara-negara Uni Eropa

Keanggotaan UE terbuka bagi setiap negara Eropa yang ingin menjadi anggota dengan persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu: negara yang bersangkutan harus berada di benua Eropa. UE sangat berhasil memperluas integrasi dari segi kuantitas, namun belum tentu berhasil dalam mempertahankan kualitas integrasinya. Kekhawatiran tentang adanya keterbatasan UE dalam memperdalam integrasi dan adanya defisit demokrasi dalam sistem pengambilan keputusan UE yang cenderung *Top Down* mulai mengemuka. Usaha UE untuk meingkatkan kualitas integrasinya sejak anggotanya berjumlah 28 yaitu dengan menampung aspirasi di Perancis dan Belanda dan merevisi konstitusi UE yang ditolak tahun

2005 menjadi Traktat Lisbon (TL) kembali mendapatkan batu sandungan setelah referendum di Irlandia menyatakan tidak untuk TL.

Tabel 3.1
Keanggotaan Uni Eropa

Tahun	Negara Anggota
1957	Belgia, Perancis, Jerman, Italia, Luxemburg dan Belanda.
1973	Denmark, Irlandia dan Inggris
1981	Yunani
1989	Portugal dan Spanyol
1995	Austria, Finlandia dan Swedia
2004	Republik Ceko, Estonia, Hongaria, Latvia, Lithuania, Malta, Polandia, Siprus, dan Slovakia
2007	Bulgaria dan Romania
2013	Kroasia

Sumber: (www.eu.int diakses 11 April 2014).

3.1.1.3.1 Kriteria Kopenhagen

Perjanjian tentang Uni Eropa menyatakan bahwa setiap negara Eropa dapat mengajukan permohonan untuk bergabung dengan Uni Eropa apabila negara tersebut menghormati nilai-nilai demokratis Uni Eropa dan berkomitmen untuk memajukannya. Kriteria yang lebih spesifik dikenal sebagai Kriteria *Copenhagen* (Kopenhagen). Kriteria tersebut menyatakan bahwa sebuah negara hanya dapat bergabung dengan Uni Eropa apabila:

1. Secara politik negara tersebut memiliki lembaga-lembaga yang stabil yang menjamin demokrasi, supremasi hukum dan hak asasi manusia.
2. Secara ekonomis negara tersebut memiliki perekonomian pasar yang berfungsi dan dapat mengatasi tekanan persaingan dan kekuatan pasar di dalam wilayah Uni Eropa.

3. Secara hukum negara tersebut menerima undang-undang dan praktik yang telah ditetapkan Uni Eropa, khususnya tujuan-tujuan utama tentang persatuan politik, ekonomi dan moneter.

Proses aksesi terdiri atas sejumlah tahapan, yang kesemuanya harus disetujui oleh semua negara Anggota Uni Eropa yang ada agar sebuah negara dapat diterima sebagai anggota. Awalnya, sebuah negara diberikan prospek keanggotaan. Negara tersebut kemudian menjadi calon resmi negara anggota, sebelum akhirnya berlanjut dengan negosiasi keanggotaan resmi. Ketika negosiasi dan reformasi yang terkait telah selesai dilakukan, negara tersebut dapat bergabung dengan Uni Eropa (Geary, 2013:68).

3.1.1.4 Program-program Kerja Uni Eropa

3.1.1.4.1Program-program Kerja Umum Uni Eropa

A. Kebijakan Uni Eropa dalam bidang HAM di kawasan dan Dunia

Hak asasi manusia, demokrasi dan supremasi hukum merupakan nilai-nilai pokok bagi Uni Eropa. Uni Eropa berupaya untuk memastikan bahwa semua hak asasi manusia baik hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial maupun budaya dihormati di mana pun, sebagaimana ditetapkan dalam Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia dan ditegaskan kembali dalam Konferensi Dunia tentang Hak Asasi Manusia tahun 1993. Uni Eropa juga mengedepankan hak-hak wanita, anak-anak, kaum minoritas, serta pengungsi.

Traktat Lisbon, yang menetapkan dasar hukum dan kelembagaan untuk Uni Eropa, mempertegas bahwa Uni Eropa berpedoman pada prinsip-prinsip berikut

ini: demokrasi, supremasi hukum, kesemestaan dan keutuhan hak asasi manusiadan kebebasan fundamental, penghormatan pada martabat manusia, prinsip-prinsip kesetaraan dan solidaritas, dan penghormatan pada prinsip-prinsip Piagam PBB dan hukum internasional. Prinsip-prinsip tersebut ditopang oleh Piagam Uni Eropa tentang hak-hak dasar, yang menuangkan seluruh hak-hak tersebut dalam satu naskah.

Walaupun Uni Eropa memiliki, secara keseluruhan, catatan yang baik dalam hal hak asasi manusia, namun Uni Eropa belum puas**.** Uni Eropa berjuang melawan rasisme, xenophobia dan bentuk-bentuk lain dari diskriminasi berdasarkan agama, jenis kelamin, usia, kecacatan dan orientasi seksual. Uni Eropa memiliki pula perhatian khusus akan hak asasi manusia dalam kaitannya dengan suaka dan migrasi (http://eeas.europa.eu/delegations/indonesia/keyeu policies/humanrights/indexid.htm diakses 20 Februari 2014).

B. Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Bersamana Uni Eropa/*Commons Foreign and Security Policy* (CFSP)

Uni Eropa memiliki kebijakan luar negeri dan keamanannya sendiri, yang memungkinkannya untuk berbicaradan bertindak sebagai satu kesatuan dalam permasalahan dunia. Di dunia internasional dan global, 28 negara Anggota Uni Eropa memiliki nilai penting dan pengaruh yang lebih besar ketika mereka bertindak secara bersama-sama sebagai Uni Eropa daripada masing-masing tersendiri sebagai 28 negara.

Hal tersebut dikukuhkan oleh Traktat Lisabon tahun 2009 yang menciptakan jabatan Perwakilan Tinggi untuk Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan, yang juga merupakan Wakil Presiden Komisi Eropa, serta dibentuknya Layanan Diplomatik Eropa Layanan Hubungan Luar Negeri Eropa/*European External Action Service* (EEAS).

Peran Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Uni Eropa adalah untuk memelihara perdamaian dan memperkuat keamanan internasional sesuai dengan prinsip-prinsip Piagam PBB; mendorong kerjasama internasional; dan mengembangkan serta mengkonsolidasikan demokrasi dan supremasi hukum serta penghormatan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan mendasar (http://eeas.europa.eu/delegations/indonesia/key_eu_policies/common_foreign_security_policy/index_id.htm diakses 20 Februari 2014).

C. Program Kebijakan Kawasan Uni Eropa

Hal-hal yang terjadi di negara-negara yang berbatasan dengan Uni Eropa akan memiliki dampak terhadap Uni Eropa sendiri. Sementara itu, tantangan-tantangan yang dihadapi di negara-negara tetangga tersebut sering kali sama dengan yang dihadapi di dalam Uni Eropa. Kebijakan-kebijakan regional Uni Eropa memberikan sebuah forum untuk mengatasi tantangan-tantangan bersama dan mendorong kebijakan-kebijakan penting lainnya mulai dari hak asasi manusia hingga masalah iklim.

Kemakmuran, stabilitas dan keamanan di negara-negara yang terletak di sebelah timur dan selatan Uni Eropa merupakan kepentingan bersama. Kebijakan

Kawasan Eropa/*European Neighbourhood Policy* (ENP) mencakup lebih dari perjanjian-perjanjian perdagangan dan kerjasama yang biasa, di antaranya ikatan politik, peningkatan integrasi ekonomi, peningkatan mobilitas dan hubungan antar warga. Rencana-rencana aksi bilateral terbuka bagi negara-negara tersebut yang ingin mempererat hubungan dengan Uni Eropa. Kemitraan Timur melengkapi ENP, dengan berupaya untuk meningkatkan hubungan politik dan perdagangan antara Uni Eropa dengan Armenia, Azerbaijan, Belarusia, Georgia, Moldova dan Ukraina. Kemitraan untuk demokrasi dan kemakmuran bersama dengan negara-negara di kawasan Mediterania Selatan mendukung langkah-langkah praktis yang menyokong transisi menuju demokrasi di negara-negara di kawasan Mediterania Selatan (http://eeas.europa.eu/delegations/indonesia/key_eu_policies/regions/index_id.htm diakses 20 Februari 2014).

D. Kemitraan Program Perdagangan Uni Eropa di Dunia

Meskipun jumlah penduduknya hanya 7% dari jumlah penduduk dunia, persentase PDB Uni Eropa adalah 25,8% dari PDB dunia, dan perdagangannya dengan negara-negara lainnya di dunia mencapai sekitar 20% dari ekspor dan impor global (tidak termasuk perdagangan antar negara-negara anggota Uni Eropa sendiri). Hal ini berarti Uni Eropa merupakan pelaku perdagangan terbesar di dunia, importir dan eksportir terbesar, investor terbesar, perekonomian terbesar dalam hal PDB, dan penerima investasi asing langsung nomor satu karena perdagangan dewasa ini tidak mencakup hanya barang-barang (http://eeas.europa

.eu/delegations/indonesia/key_eu_policies/trade/index_id.htm diakses 20 Februari 2014).

Uni Eropa memiliki kebijakan perdagangan untuk Eropa. Perdagangan dengan negara-negara lain menciptakan pertumbuhan dan lapangan kerja di dalam negeri. Namun demikian transaksi-transaksinya tentu saja saling menguntungkan tidak ada negara yang dapat berkembang di dalam perbatasan yang tertutup. Saat ini, sekitar 60% dari setiap produk akhir Eropa baik bahan baku, komponen atau lainnya secara langsung maupun tidak langsung berasal dari negara atau wilayah lain di dunia. Hal ini saja merupakan alasan untuk menolak proteksionisme: Eropa bergantung pada impor komoditas-komoditas dan bahan baku penting serta butuh untuk mengakses pasar-pasar di seluruh dunia (http://eeas.europa.eu/delegations/ indonesia/key_eu_policies/trade/index_id.htm diakses 20 Februari 2014).

Uni Eropa berupaya untuk menghilangkan hambatan-hambatan perdagangan. Perdagangan yang terbuka dan adil mendorong adanya persaingan sekaligus memberikan manfaat bagi para konsumen. Uni Eropa percaya pada sistem yang berdasarkan aturan, yang berpusat pada Organisasi Perdagangan Dunia/*World Trade Organisation* (WTO) dan mekanisme-mekanisme multilateralnya. Uni Eropa akan menyambut baik kemajuan dalam perundingan-perundingan perdagangan multilateral, yang dikenal sebagai Putaran Doha. Namun untuk sementara, Uni Eropa juga melaksanakan perundingan-perundingan perdagangan bilateral.

3.1.1.4.2Program-program Penanganan Krisis Ekonomi Uni Eropa.

A. Program Penanganan Krisis melalui Kebijakan Keamanan dan Pertahanan Bersama/*Common Security and Defence Policy* (CSDP).

Di saat krisis, Uni Eropa dapat merespon secara politik, diplomatik, ekonomi, finansial, militer, yudisial atau melalui bantuan pembangunan. Proses disetujuinya suatu pendekatan akan tergantung pada pendekatan yang dipilih.

Tantangan terbesar adalah mengkoordinasikan berbagai pilihan respon baik sipil maupun militer. Departemen Tanggap Krisis dan Koordinasi Operasional dari EEAS menjalankan perannya, dengan membantu Perwakilan Tinggi untuk memastikan adanya keterpaduan. Departemen tersebut juga mengikuti persitiwa-peristiwa yang terjadi di dunia dengan sangat cermat sehingga EEAS dapat merespon secara cepat terhadap krisis yang timbul ataupun yang mungkin terjadi.

Departemen tersebut juga mengelola Ruang Kendali Operasional Uni Eropa (*EU Situation Room*) sebuah badan pemantau yang selalu siap siaga untuk memberikan layanan garis depan kepada delegasi dan misi Uni Eropa di luar negeri atau mengaktifkan sebuah sarana penanganan krisis.

Struktur politik dan militer yang permanen telah ada, di bawah payung Kebijakan Keamanan dan Pertahanan Bersama/*Common Security and Defence Policy* (CSDP), untuk mendukung kegiatan-kegiatan Uni Eropa dalam penanganan krisis. Misi-misi CSDP telah dilaksanakan di seluruh dunia, mulai dari Bosnia dan Kosovo sampai Niger, Kongo dan Somalia. Misi-misi tersebut terutama mendukung reformasi dan pengembangan kapasitas kebijakan,

peradilan, dan kepabeanan (http://eeas.europa.eu/delegations/indonesia/key_eu_policies/crisis_management/index_id.htm diakses 20 Februari 2014).

B. Program Penanganan Krisis melalui *The European Financial Stability Facility* (EFSF).

Mendirikan *The European Financial Stability Facility* (EFSF) yang dibentuk oleh negara anggota Uni Eropa sejak 9 Mei 2010. Mandat EFSF adalah untuk mengamankan kestabilan finansial di Eropa dengan menyediakan asistensi *Euro* di area Negara Anggota. EFSF berwenang untuk menggunakan instrumen sebagai berikut:

i. Memberikan bantuan pinjaman kepada negara-negara yang mengalami kesulitan finansial.
ii. Ikut campur dengan hutang primer dan pasar kedua. Campur tangan di pasar kedua hanya akan diberlakukan pada basis ECB yang menyadari adanya pengecualian sirkulasi pasar finansial dan resiko stabilitas keuangan.
iii. Beraksi pada basis program pertahanan
iv. Kapitalisme ulang pada institusi keuangan melalui bantuan untuk pemerintahan

EFSF memiliki jaminan dan komitmen dari Negara Anggota Uni Eropa dengan jumlah dana sebesar 780 miliar *Euro* dan memiliki kapasitas peminjaman uang sebesar 440 miliar *Euro*. Anak organisasi ini telah cukup banyak membantu penyelesaian krisis ekonomi dengan meminjamkan dana kepada negara yang

sedang membutuhkan agar dapat mengembangkan perekonomian negaranya (http://www.efsf.europa.eu/about/index.htm diakses 29 April 2014).

C. Program Penangan Krisis melalui *The Stability and Growth Pact* (SGP)

Merancang *The Stability and Growth Pact* (SGP) yang merupakan sebuah perangkat aturan untuk mendukung Anggota Negara untuk mempertahankan suara publik dalam hal finansial. SGP memiliki dua bagian, pertama sebagai Divisi Pencegahan yang akan memberikan peringatan awal untuk pengurangan yang ekstrim. Sedangkan divisi kedua sebagai pengoreksi pemerintah mengenai *Excessive Deficit Procedure* (EDP) yang akan merekomendasikan isu baru mengenai defisit anggaran sebuah negara kepada dewan untuk kemudian memberikan sanksi untuk Negara Anggota tersebut.

The Stability and Growth Pact (SGP) memiliki tujuan utama sebagai berikut:

i. Memperbolehkan Divisi Pengoreksi SGP untuk mengambil peranan yang lebih besar dalam mengatur hal-hal diantara defisit dan hutang, lebih spesifik lagi pada negara-negara dengan jumlah hutang paling tinggi (dimana hutang publiknya mencapai 60% dari jumlah GDP)
ii. Mempercepat EDP dan membuat sanksi kepada Negara Anggota yang melanggar persyaratan yang dibuat oleh komisi.
iii. Meningkatkan kerangkat target dana nasional, membicarakan perhitungan dan isu statistik sebaik melakukan praktiknya (http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/index_en.htm diakses 29 April 2014).

3.1.2 Gambaran Umum Yunani

3.1.2.1 Gambaran Umum Sistem Ekonomi Yunani

Yunani (Greece) adalah negara yang menganut sistem ekonomi kapitalis yaitu sistem ekonomi yang pada hakikatnya segala aturan kehidupan masyarakat, termasuk di bidang ekonomi, tidaklah diambil dari agama tetapi sepenuhnya diserahkan kepada manusia, apa yang dipandang memberikan manfaat. Dengan azas manfaat ini, yang baik adalah yang memberikan kemanfaatan material sebesar-besarnya kepada manusia dan yang buruk adalah yang sebaliknya. Sehingga kebahagiaan di dunia ini tidak lain adalah terpenuhinya segala kebutuhan yang bersifat materi, baik itu materi yang dapat diindera dan dirasakan (barang) maupun yang tidak dapat diindera tetapi dapat dirasakan (jasa) **(**http://www.stiemj.ac.id/downlot.php?file=1.%20jurnal-krisis%20yunani diakses 21 April 2014).

Perekonomian Yunani secara umum ditunjang oleh sektor seperti pariwisata, perkapalan, produk industri, pemrosesan makanan dan tembakau, tekstil, kimia, produk baja, pertambangan dan perminyakan. Pertumbuhan PDB , rata-rata, sejak tahun 1990-an lebih tinggi daripada rata-rata anggota Uni Eropa. Namun, ekonomi Yunani juga menghadapi masalah-masalah yang signifikan, termasuk naiknya tingkat pengangguran, birokrasi yang tidak efisien, penghindaran dari pajak dan tentu saja korupsi. Yunani menderita korupsi ekonomi yang tinggi serta kompetisi global yang rendah bila dibandingkan dengan rekan-rekan Uni Eropa lainnya.

Bergabungnya Yunani dalam Komunitas Eropa sebenarnya diharapkan dapat membantu perekonomian Yunani melalui pasar bersama, namun Yunani kesulitan beradaptasi dengan kompetisi pasar karena industri di Eropa Utara sudah lebih maju dan mapan. Akibatnya, terjadi penurunan PDB per kapita yakni dari 58 % PDB per kapita rata-rata ME di tahun 1980, menjadi 52 % pada tahun 1991. Antara tahun1980-1990-an, Yunani memiliki utang yang besar terkait dengan defisit anggaran (http://arvinradcliffe.news.com/2013/01/faktor-penyebab-krisis-ekonomi-eropa.html diakses 23 April 2014).

Bila ditilik ke belakang, Yunani menjadi satu-satunya anggota Komunitas Eropa yang ingin menjadi bagian dari Perjanjian *Maastricht* namun tidak dapat memenuhi kriteria atau syarat menjadi anggota Uni Eropa dikarenakan oleh inflasi, defisit anggaran, utang, dan suku bunga yang tinggi. Kemudian Yunani berusaha memperbaiki perekonomiannya dengan program penghematan dan usaha ini membuahkan hasil positif. Yunani akhirnya dapat memenuhi kriteria; inflasi 2,1%, defisit anggaran 1,7% dari PDB (di bawah 3% ketetapan Perjanjian *Maastricht)* dan resmi tahun 2001 Yunani dapat bergabung dengan Uni Eropa. Dalam perjalanan selanjutnya, Yunani tergabung dalam zona *Euro*. Namun, pada akhirnya terkuak fakta bahwa data-data ekonomi yang memuluskan langkah Yunani menjadi bagian dari zona *euro* adalah semua hasil rekayasa (http://arvinr adcliffe.news.com/2013/01/faktor-penyebab-krisis-ekonomieropa.html diakses 23 April 2014).

Sebagai sebuah hasil dari faktor ekonomi-politik internasional (krisis finansial) dan lokal (pengeluaran yang tidak terkontrol untuk pemilihan umum

nasional pada bulan Oktober 2009), ekonomi Yunani menghadapi krisisnya yang paling berat sejak tahun 1993. Ini ditambah dengan meningkatnya utang yang menyebabkan krisis ekonomi yang parah. Permasalahan politik juga ikut ambil bagian dalam permasalahan ekonomi ini yaitu banyak masyarakat yang menghindari untuk membayar pajak. Hal ini dianggap merupakan kegagalan pemerintahan Sosialis yang terpilih bulan Oktober 2009. Tuduhan ini dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya yang meragukan kredibilitas pemerintahan baru ini. Pada minggu-minggu pertama tahun 2010, ada kekhawatiran yang kembali muncul mengenai utang nasional yang berlebihan. Kekhawatiran ini berdasar pada kemungkinan negara-negara lain tertular krisis ekonomi yang terjadi di Yunani, seperti Spanyol dan Italia yang mulai menghadapi masalah finansial. Inilah yang kemudian memunculkan permasalahan yang berentetan dengan negara-negara Uni Eropa lain karena keterikatan secara politis maupun ekonomis.

3.1.2.2 Gambaran Umum Krisis Ekonomi Yunani

3.1.2.2.1 Krisis Ekonomi Yunani dan Dinamikanya

Pada tahun 1999 saat Perjanjian *Maastricht* ditandatangani, Yunani dinyatakan belum memenuhi persyaratan fiskal yang diatur oleh *convergence criteria* (kriteria konvergensi) untuk bergabung dengan *Eurozone* (Zona Eropa). Akan tetapi, pada tahun 2001, Yunani dinyatakan sudah memenuhi semua persyaratan untuk bergabung dengan *Eurozone* (Zona Eropa) dan diizinkan untuk mengadopsi *euro* sebagai mata uang. *Euro* secara resmi digunakan sebagai mata uang Yunani pada tahun 2002 untuk menggantikan mata uang sebelumnya, yaitu

drachma. Yunani pun menjadi negara ke-12 yang mengadopsi *euro* sebagai mata uang. Sebelum bergabung menjadi anggota *Eurozone* (Zona Eropa), Yunani menjadi salah satu negara anggota yang menunjukkan performa ekonomi yang buruk di regional Eropa. Hal ini dapat dilihat dari inflasi tahunan Yunani yang merupakan salah satu tingkat inflasi tertinggi di regional tersebut, pengeluaran pemerintah yang tinggi, dan pertumbuhan PDB yang lambat jika dibandingkan dengan negara-negara Eropa yang lain. Euforia dan optimisme akan era baru dalam pertumbuhan ekonomi dan stabilitas finansial merupakan bagian dari perekonomian Yunani, kemudian Yunani bergabung menjadi anggota *Eurozone* (Zona Eropa), hal tersebutlah yang berakibat mendorong ketidakseimbangan yang berkelanjutan dalam perekonomian Yunani. Meskipun dengan bergabungnya Yunani ke dalam anggota *Eurozone* (Zona Eropa), Yunani memiliki banyak manfaat yang didapatkan. Salah satunya adalah memiliki akses untuk masuk ke pasar kapital Eropa, yang artinya Yunani dapat melakukan pinjaman dalam jumlah besar namun dengan suku bunga rendah layaknya negara-negara besar anggota Uni Eropa, seperti Jerman dan Perancis (http://www.guardian.co.uk/ business/markets-pressure-greece-cut-spending diakses pada 20 Juli 2014).

Akan tetapi, berdasarkan rasio ekonomi pemerintah Yunani dan aturan dari Uni Eropa, lebih mudah bagi Yunani untuk melakukan impor komoditas dengan menggunakan pinjaman dari *Eurozone* (Zona Eropa) untuk memenuhi kebutuhan nasionalnya dibanding melakukan produksi dengan mengandalkan sektor industri dalam negeri Yunani. Akhirnya, sejak bergabung dengan *Eurozone* (Zona Eropa), jumlah ketidakseimbangan dalam neraca perdagangan Yunani terus meningkat,

serta jumlah rasio hutang Yunani pun terus meningkat. Hal ini juga mendorong perekonomian Yunani menjadi tidak kompetitif. Setelah menjadi tuan rumah *Olympics* 2004, hutang Yunani semakin membengkak akibat pembangunan infrastruktur yang memerlukan dana yang besar untuk mempersiapkan *Olympics*. Akhirnya pemerintah Yunani mengaku bahwa telah memanipulasi data, terkait kondisi perekonomian nasional, agar bisa bergabung dengan *Eurozone* (Zona Eropa). Sejak tahun 2004-2006, Komisi Uni Eropa telah menetapkan Yunani di bawah pengawasan dikarenakan defisit anggaran, Yunani telah melanggar standar yang ditetapkan SGP, yaitu sebesar 3%. Di bawah pengawasan Uni Eropa, pemerintah Yunani berhasil menurunkan defisit anggaran dari 7,5% pada tahun 2004 menjadi 2,6% pada tahun 2006. Akan tetapi, setelah dilakukan revisi data, ternyata defisit pada tahun 2006 tidak terlalu berbeda jauh dari tahun 2004, yaitu sebesar 5,7%. Lemahnya struktur ekonomi Yunani, mendorong defisit anggaran Yunani mencapai 15,6% pada akhir tahun 2009 yang juga merupakan sebagai dampak terjadinya krisis finansial global. Artinya, sejak bergabung dengan *Eurozone* (Zona Eropa), Yunani tidak pernah memenuhi persyaratan yang ditetapkan *convergence criteria* (kriteria konvergensi) maupun SGP. Berdasarkan data yang diperoleh dari *Eurostat*, badan Uni Eropa yang berfungsi mengolah data statistika dari negara-negara anggota Uni Eropa, sejak tahun 2001, yaitu tahun bergabungnya Yunani dengan *Eurozone* (Zona Eropa), persentase rasio hutang pemerintah Yunani terhadap jumlah PDB selalu berada di atas 60% dan persentase defisit selalu di atas 3%. Sehingga hal tersebut dapat memberikan dampak yang buruk terhadap perekonomian Yunani sendiri, dikarenakan

pemalsuan data Yunani yang berdampak pada permasalahan fiskal (http://www.guardian.co.uk/business/markets-pressure-greece-cut-spending diakses pada 20 Juli 2014).

Permasalahan fiskal yang terjadi di Yunani mulai menjadi perhatian dunia internasional setelah pemilihan legislatif pada Oktober 2009. Beberapa minggu setelah terpilih sebagai Perdana Menteri Yunani, George Papandreou mengumumkan bahwa persentase defisit Yunani sebenarnya mencapai 12,7% dari jumlah PDB. Jumlah ini tentunya memiliki selisih yang jauh dari total defisit yang diumumkan oleh pemerintahan sebelumnya yang dipimpin Costas Caramanlis, yaitu sebesar 6%. Defisit fiskal Yunani semakin memburuk secara signifikan seiring dengan memburuknya dampak krisis ekonomi global 2008 yang melanda tidak hanya negara di Eropa, melainkan hampir seluruh negara di dunia. Setelah mengalami dinamika perekonomian yang fluktuatif, akhirnya pada tahun 2009 Yunani memasuki resesi yang berkepanjangan. Defisit fiskal yang Yunani yang terakumulasi dari hutang yang membengkak memicu terjadinya Krisis Ekonomi. *Balance of payment* Yunani sendiri selalu menunjukkan angka defisit yang konsisten jika dibandingkan dengan negara-negara maju lainnya khususnya di Eropa.

Selain mengalami Krisis Ekonomi, Yunani juga mengalami krisis kepercayaan pasar yang tentunya semakin memperburuk Krisis Ekonomi yang tengah terjadi. Yunani mendapat kritik keras dari media internasional, organisasi internasional, agensi *rating*, dan dari Uni Eropa sendiri. Pemalsuan data fiskal yang dilakukan oleh rezim pemerintahan sebelumnya berhasil membuat tingkat

kepercayaan pasar terhadap obligasi Yunani berkurang dan *rating* obligasi Yunani turun secara signifikan. Selain itu, melihat tingginya hutang publik Yunani membuat nilai obligasi Yunani semakin tidak menarik. Spekulasi-spekulasi pasar terhadap kebijakan fiskal yang akan diambil pemerintah yang berkuasa juga semakin menyudutkan Yunani (http://www.guardian.co.uk/business/07/greece fiscalcrisis-european-union-euro diakses pada 22 Juni 2014).

3.1.2.2.2 Kronologi Perjalanan Krisis Ekonomi Yunani

Tahun 1981 Yunani menjadi anggota Uni Eropa dan pada Januari 2002 Yunani resmi menjadi anggota zona *Euro* karena dianggap memenuhi persyaratan seperti defisit anggaran negaranya tidak di atas 3%, rasio utang tidak melebihi 60% dari PDB. Namun, kenyataannya tidak demikian. Dalam perjalanan perekonomiannya, ternyata defisit anggaran tidak pernah di bawah 3% seperti yang diharuskan otoritas. Akhir tahun 2004, pemerintah Yunani sadar akan hal itu, namun sepertinya mereka tidak mau berbenah sehingga perekonomiannya sampai pada tahap yang mengkhawatirkan seperti saat ini. Di samping itu, meskipun Uni Eropa telah mengetahui dan menegur Yunani akan hal ini, pemerintah tetap saja tidak berusaha maksimal dalam memulihkan ekonomi bangsanya sehingga berimbas pada tingginya angka inflasi dan angka pengangguran. Sebagai akibatnya aksi demonstrasi bermunculan. Dalam hal ini, penulis juga melihat ketidak efektivan Uni Eropa. Pemalsuan anggaran semenjak Yunani menjadi bagian dari Uni Eropa hanya direspon dengan sebuah peringatan. Sepertinya akan lebih bermanfaat jika Yunani diberikan sanksi atas

ketidaktaatannya itu sehingga mereka bisa kembali menyehatkan perekonomiannya. Jika hal demikian dilakukan, mungkin saja perekonomian tidak akan seperti saat ini. Melihat ekonomi bangsanya yang tidak sehat, pemerintah mengambil jalan pintas dengan memprivatisasi perusahaan-perusahaan negara, menaikkan pajak dan memotong gaji para pensiunan. Tentu langkah ini sangat memberatkan warganya. Akibatnya, para pekerja sektor publik, pelajar, dan pemuda melakukan demonstrasi besar-besaran sebagai protes atas kebijakan pemerintah yang dinilai sangat tidak berpihak kepada rakyat (http://cetak.kompas.com/read/2013/11/ 23/03162561/ue.terancam.retak diaskes 20 Maret 2014).

Berikut ini adalah kronologi perjalanan krisis ekonomi Yunani pada tahun 2009 sampai dengan 2013 sebagai berikut:

1. Tahun 2009

a) Partai PASOK memenangkan pemilu sehingga George Papendrou berhak menjabat sebagai perdana menteri. Pada tahun ini, ekonomi sudah berkontraksi 0,3% dan beban utang nasional melambung sampai 262 miliar *Euro* (dari 168 miliar *Euro* pada tahun 2004). Pemerintah memperkirakan defisit sangat tinggi, di atas 6%.

b) Rating kredit Yunani dipangkas oleh lembaga pemeringkat *Fitch* akibat beban utang yang membengkak dan dikhawatirkan mengalami *default* dari A- ke BBB+. Hal serupa dilakukan oleh S&P beberapa pekan berselang. Inilah untuk kali pertama Yunani kehilangan status A- dan memicu kegundahan di pasar saham dunia. PM George Papendrou

langsung mengumumkan program pemotongan belanja publik. Bentrokan pecah di Athena memperingati satu tahun tewasnya seorang remaja yang ditembak oleh polisi (http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/country_profiles /1014812.stm diakses 10 April 2014).

Di bawah kepemimpinannya sebagai perdana menteri yang baru, George Papendrou langsung memotong dana dan gaji publik, menaikkan pajak sebagai langkah penghematan atas tingginya beban utang, kontraksi ekonomi, dan besarnya defisit. Tidak cukup satu tahun setelah terpilih, Papendrou telah melakukan tiga kali langkah penghematan. Ironisnya, setiap langkah penghematan ini selalu direspon oleh warganya dengan aksi protes besar-besaran.

2. Tahun 2010

a) Pemerintah mengumumkan putaran kedua langkah-langkah penghematan yang lebih sulit yaitu pemotongan gaji sektor publik dan peningkatan harga bahan bakar. Aksi mogok umum dan protes terus terjadi sebagai aksi protes terhadap kebijakan pemerintah.

b) PM George Papendrou mengumumkan kali ketiga kenaikan pajak dan pemotongan belanja senilai $6,5 miliar untuk mengikis defisit dan melunasi utang dan mengibaratkan krisis anggaran seperti “situasi perang”.

c) Papendrou berpaling ke Uni Eropa dan IMF untuk mendapatkan dana segar. Ketakutan kemungkinan *default*, dengan cepat Yunani menyetujui syarat paket penyelamatan (*bailout*) senilai 110 miliar *Euro* bagi

negaranya untuk menutupi kewajiban pinjaman sampai tahun 2013. Sebagai prasyarat dari *bailout*, PM Papendrou mengumumkan langkah-langkah penghematan yang lebih ketat lagi. Serikat buruh melakukan aksi mogok umum sebagai bentuk protes atas kebijakan pemerintah menyetujui *bailout*.

d) Aksi demonstrasi 48 jam mewarnai jalan-jalan Yunani. Beberapa bank dibakar yang mengakibatkan tiga orang tewas
e) Ribuan orang turun ke jalan Athena, menentang pemangkasan anggaran. Aksi serupa juga terjadi di Portugal dan Irlandia.
f) Pemerintah mengumumkan langkah-langkah penghematan anggaran baru di tahun 2011 yang lebih keras lagi seperti membuat pajak baru yang lebih tinggi dari PPn (http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/country_profiles /1014812.stm diakses 10 April 2014).

Ancaman *default* (gagal bayar utang) atas tingginya utang negara membuat pemerintah Yunani lewat perdana menterinya meminta bantuan kepada Uni Eropa dan IMF. Kedua badan ini bersedia memberikan bantuan dana talangan *(bailout)* kepada Yunani sebanyak 110 miliar *Euro* dengan jangka waktu 3 tahun. Sebagai timbal baliknya, Yunani diwajibkan untuk melakukan penghematan yang lebih ketat lagi sebagai prasyarat mendapatkan *bailout*. Prasyarat ini direspon Papendrou dengan mengumumkan penghematan anggaran baru yang lebih keras lagi di tahun 2011 dengan jalan membuat pajak baru yang lebih tinggi dari PPn. Hal ini tentu tidak diterima rakyatnya. Untuk itu, rencana tersebut langsung

ditentang oleh rakyatnya lewat demonstrasi selama 48 jam yang sampai menimbulkan 3 korban jiwa.

3. Pada Tahun 2011

a) Uni Eropa dan IMF mengatakan tindakan yang dilakukan Yunani sejauh ini belum cukup sehingga harus mempercepat reformasi supaya keuangan negaranya kembali pulih.

b) Bunga obligasi Yunani melonjak lagi di tengah kecemasan bahwa program efisiensi tidak akan berhasil. Negara ini sekarang berada dalam titik resesi sehingga warga kembali turun ke jalan.

c) Aksi kekerasan kembali terjadi di Athena saat Papendrou berupaya mengkampanyekan pemangkasan baru 28 miliar *Euro* selama 4 tahun.

d) Yunani membutuhkan *bailout* baru 110 miliar untuk menghindari *default*. Permintaan itu tidak dikabulkan pihak Jerman, yang justru meminta kreditur menerima kerugian dari aset obligasi Yunani. Sikap pemimpin *Euro* masih terpecah soal gagasan Jerman

e) IMF menyerukan agar pemimpin Eropa bekerjasama dalam bertindak supaya bencana utang bisa ditangkal. Negara lain bisa tertular krisis jika tidak aktif berpartisipasi dalam program pemulihan.

f) George Papendrou selamat dari mosi tidak percaya parlemen. Ia meraih 155 dukungan berbanding 143 penolakan. Hal ini disambut baik oleh Komisi Eropa.

g) Parlemen merestui niat pemerintah memangkas pajak baru dan anggaran belanja senilai 28 miliar *Euro*. Aksi demonstrasi kembali merebak.

h) Uni Eropa menyatakan kesiapannya memberikan *bailout* 109 miliar *Euro*, dengan ketentuan bahwa investor swasta harus menerima pemangkasan nilai obligasi sampai 20%.

i) Yunani mengumumkan pungutan pajak baru sebagai syarat untuk mendapatkan *bailout* selanjutnya. Baik pihak pemerintah maupun parlemen juga harus menerima pemangkasan nilai gaji sebagai bagian dari rencana efisiensi.

j) Lembaga pemeringkat utang, Moody memangkas peringkat delapan bank Yunani karena kekhawatiran atas kemampuan Yunani untuk membayar kembali utangnya (http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/countryprofiles/1014812.stm diakses 10 April 2014).

Meskipun langkah penghematan yang telah dilakukan oleh Yunani selama ini dirasakan sudah sangat ketat, namun menurut Uni Eropa dan IMF hal itu belum cukup. Yunani harus menambah program-program penghematannya. Di tengah kekacauan ekonomi dan potensi *default*, Yunani kembali meminta *bailout* kepada Uni Eropa namun kali ini pemberiannya tidak semulus sebelumnya karena pihak Jerman menolak pencairan itu.

Di tengah situasi yang semakin mengkhawatirkan, pemerintah Yunani masih tetap mengharapkan bantuan dari Uni Eropa dan IMF. Dan kali ini, Uni Eropa kembali menyatakan kesiapannya dalam memberikan *bailout* kepada Yunani sebanyak 109 miliar *Euro* dengan syarat investor swasta harus menerima

pemangkasan nilai obligasi sampai 20%. Langkah tersebut disambut oleh Yunani dengan melakukan pungutan pajak baru sebagai syarat untuk mendapatkan *bailout.* Pihak pemerintah maupun parlemen juga harus menerima pemangkasan nilai gaji sebagai bagian dari rencana efisiensi. Melihat besarnya risiko yang akan ditimbulkan oleh krisis ekonomi Yunani terhadap negara lain, IMF menyerukan agar pemimpin Eropa, dalam hal ini pemimpin setiap negara di Benua Eropa khususnya negara zona *Euro* turut berperan aktif bekerjasama dalam bertindak supaya bencana utang bisa diminimalisi.

4. Tahun 2012

a) Pemerintah Eropa menambah kapasitas dana *bailout* menjadi sekitar 1 triliun *Euro* dengan syarat penghematan yang lebih ketat lagi. Athena bisa meraih *bailout* 100 miliar *Euro* di awal tahun berikutnya. Setelah melalui pembahasan alot berjam-jam, pihak investor menerima nilai aset Yunani dipotong 50% untuk mengurangi beban utang negara itu.

b) PM George Papendrou mengumumkan sebuah referendum demi paket penyelamatan yaitu menerima *bailout* atau tidak. Papendrou mendapatkan banyak kritik yang serius atas rencana referendum. Nasibnya sebagai kepala pemerintahan dipertaruhkan sebagai risiko atas sikapnya itu.

c) Sang perdana menteri membatalkan rencana menggelar referendum. Menteri Keuangan, Evangelos Vanizelos meredam kecemasan dengan pernyataannya bahwa keanggotaan Yunani terlalu berharga untuk ditaruh di meja voting. Untuk pertama kali dalam sejarah, petinggi G-20 bertemu

di Cannes, Prancis. Mayoritas delegasi sepakat bahwa Yunani harus keluar dari zona *Euro* jika gagal mengatasi krisisnya.

d) George Papendrou *resign* dari kursi perdana menteri pada tanggal 06 Nopember 2011
e) Lucas Papademos mengambil alih kepemimpinan kabinet sebagai utusan dari partai koalisi.
f) Perundingan penjadwalan kembali utang dengan kreditur swasta Yunani mengalami *deadlock* karena pemerintah meminta kreditur swasta merelakan nilai asetnya dipangkas sampai 70% untuk mengurangi beban Yunani sementara pihak koalisi menolak klausul pemangkasan dana pensiun yang diberlakukan IMF, Uni Eropa dan Bank Sentral Eropa. Hal ini mengancam tidak dicairkannya *bailout* tahap kedua senilai 130 miliar *Euro* dari Uni Eropa/IMF.
g) Menteri Keuangan Uni Eropa bersikeras bahwa "*debt swept*" atau kesepakatan menukar utang dengan sejumlah ketentuan secara timbal balik adalah suatu kondisi yang harus dipenuhi sebelum mereka setuju untuk menandatangani *bailout* 130 miliar *Euro*. Yunani mencapai kesepakatan dengan sektor swasta yang memberi pinjaman untuk memangkas utangnya, memungkinkan utang Yunani yang menggelembung berkurang.
h) Pemilihan parlemen dilakukan lebih awal. Partai Demokrasi Baru dan PASOK sebagai partai pro *bailout* berkoalisi karena suaranya merosot, sementara suara partai oposisi Sayap Kiri dan Kanan yang anti *bailout* meningkat. Tidak ada keputusan yang dihasilkan dalam pemilu ini.

Presiden Karolos Papoulias memutuskan mengadakan pemilu tanggal 17 Juni 2012 terkait *bailout* dan keanggotaan Yunani di Uni Eropa.

i) Pemimpin Partai Demokrasi Baru, Antonis Samaras membentuk koalisi dengan Partai PASOK dan partai-partai kecil untuk mengejar program penghematan.

j) Pemilihan umum digelar, Partai Demokrasi Baru memperoleh suara mayoritas 29,8% suara dan mendapatkan 129 dari 300 kursi di badan legislatif. Itu artinya Yunani tetap berada dalam zona *Euro* dan akan menerima *bailout* tahap selanjutnya. Sementara Syriza memenangkan 26,8% dan 71 kursi di parlemen. Sedangkan Partai Sosialis PASOK memperoleh suara 12,4% dengan 33 kursi di parlemen.

k) Serikat pekerja melakukan aksi pemogokan umum selama 24 jam terhadap langkah-langkah penghematan pemerintah. Polisi menembakkan gas air mata untuk membubarkan unjuk rasa anarkis di luar gedung parlemen.

l) Rancangan anggaran untuk 2013 memperkirakan kontraksi ekonomi lebih lanjut dan beban utang yang lebih tingg. Kemudian Perdana Menteri Samaras memperingatkan pemerintahnya bahwa pada akhir bulan Nopember akan menerima bantuan internasional.

m) Parlemen melewati rencana penghematan 13.5bn-*Euro* bertujuan untuk mengamankan putaran berikutnya pinjaman Uni Eropa dan *bailout* IMF; paket - yang keempat dalam tiga tahun - termasuk kenaikan pajak dan pemotongan anggaran pensiun.

n) Menteri keuangan zona *Euro* dan IMF setuju untuk melepaskan angsuran berikutnya dari pinjaman *bailout* Yunani pada bulan Desember. Kesepakatan itu dipandang sebagai mengurangi risiko Yunani meninggalkan *Euro* (http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/country_profiles/1014812.stm diakses 10 April 2014).

Melihat besarnya jumlah utang yang dimiliki Yunani, pihak investor setuju untuk memutihkan 50% utang Yunani dengan syarat penghematan yang lebih ketat lagi. Meskipun utangnya sudah dikurangi, perekonomian Yunani masih mendapatkan perhatian serius dari para pemimpin G-20 dengan menggelar sebuah pertemuan untuk membahas solusi bagi Yunani. Dan mayoritas delegasi sepakat bahwa Yunani harus keluar dari zona *Euro* jika gagal mengatasi krisisnya. Untuk itu, Papendrou memutuskan akan menggelar referendum terkait *bailout* dari Uni Eropa sekaligus menentukan apakah Yunani masih akan bergabung dalam zona *Euro* atau keluar dari zona *Euro*. Hal ini ditentang habis-habisan oleh rakyatnya yang membuat Papendrou mengundurkan diri dari jabatannya sebagai perdana menteri dan digantikan oleh Lucas Papademos. Referendum pun batal dilaksanakan.

Jika krisis Yunani dicermati dengan baik, maka pihak yang paling dirugikan adalah pihak swasta sebagai kreditur dan para investor. Dimana sebagian besar utang Yunani adalah berasal dari pihak-pihak tersebut. Melihat resiko *default* Yunani sangat tinggi, pemimpin Uni Eropa mendesak pemerintah Yunani untuk membujuk para kreditur dan investor untuk memotong sebagian besar utang mereka. Ironisnya, meskipun utang Yunani telah disetujui oleh pihak swasta untuk

dikurangi sebanyak 50%, pemerintah Yunani sepertinya tidak tahu berterima kasih karena angka sebelumnya dinaikkan ke angka 70%. Wajar dalam pertemuan kedua pihak kesepakatan sulit tercapai. Di samping itu, meskipun utangnya telah dikurangi, *bailout* Uni Eropa tetap dibutuhkan oleh Yunani untuk membayar utangnya. Melihat *deadlock* yang terjadi, Uni Eropa memperingatkan pemerintah Yunani tidak akan mencairkan *bailout* jika kesepakatan pemotongan utang tidak sampai terjadi.

Kekacauan perekonomian Yunani juga semakin diperparah oleh rivalitas partai-partai yang berkuasa di negara ini karena kelihatannya partai hanya fokus pada masalah *bailout* antara diterima atau ditolak. Ada tiga partai besar yang memegang peranan dalam pemerintahan Yunani yaitu Partai Demokrasi Baru, Partai Sosialis PASOK, dan Partai Syriza. Partai-partai kecil lainnya beserta perolehan suaranya dalam pemilu 17 Juni lalu adalah *Independent Greeks* mendapatkan 20 kursi (7,5% dukungan), *Golden Dawn* mendapatkan 18 kursi, *Democratic Left* 17 kursi, dan Partai Komunis mendapatkan 12 kursi.

5. Pada Tahun 2013

a) Pengangguran meningkat hingga 26,8% - tingkat tertinggi di Uni Eropa.
b) Pengangguran kaum muda naik ke hampir 60%.
c) Yunani setuju untuk melanjutkan langkah-langkah penghematan yang diminta oleh troika dari kreditur internasional - Komisi Eropa, Bank Sentral Eropa dan Dana Moneter Internasional. Kesepakatan itu dipandang

sebagai membawa negara selangkah lebih dekat untuk menerima tahap berikutnya dari dana talangan.

d) Parlemen melewati RUU sanksi 15.000 PHK pegawai negeri. Undang-undang baru ini dirancang untuk membatalkan apa yang telah menjadi jaminan pekerjaan dalam konstitusional seumur hidup.

e) Pemerintah mengumumkan tanpa peringatan bahwa ia menangguhkan penyiar ERT negara dalam upaya untuk menghemat uang. Keputusan menimbulkan protes massal dan pemogokan selama 24 jam.

f) Setelah runtuhnya pembicaraan mengenai masa depan ERT, salah satu mitra koalisi junior PM Antonis Samaras meninggalkan pemerintahannya, kemudian mengurangi koalisi parlemen yang dimana mayoritas hanya tiga parlemen.

g) Demonstrasi berlangsung di seluruh kota, kemudian menyusul pembunuhan seorang aktivis dari *Left-Party* yang dicurigai oleh neo-Nazi.

h) Pemerintah meluncurkan tindakan keras terhadap *Right-Party Golden Dawn*. Pemimpin Partai Nikolaos Michaloliakos dan lima anggota parlemen *Golden Dawn* lainnya ditangkap atas tuduhan termasuk penyerangan dan pencucian uang milik sebuah organisasi kriminal.

i) Dua anggota partai *Golden Dawn* yang ditembak mati di luar kantor di pinggiran kota Athena. Oleh sebuah kelompok militan *Left-Party* kemudian mengklaim bertanggung jawab atas pembunuhan (http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/country_profiles/1014812.stm diakses 29 April 2

3.1.2.2.3 Penyebab Krisis Ekonomi Yunani

Penyebab utama terjadinya Krisis Ekonomi adalah akumulasi hutang yang menumpuk, sehingga menyebabkan pemerintah Yunani mengalami defisit dalam jumlah yang besar bahkan tidak sanggup melunasi hutangnya yang akan jatuh tempo beserta bunganya. Perekonomian Yunani sangat rentan karena beberapa faktor yang akhirnya menyebabkan pertumbuhan ekonomi tidak berkelanjutan. Pertama, karena ketidakseimbangan fiskal. Rasio hutang dan defisit terhadap jumlah PDB Yunani tertinggi jika dibandingkan dengan negara anggota *Eurozone* (Zona Eropa) yang lain. Kedua, dikarenakan besarnya anggaran belanja pemerintah. Anggaran belanja pemerintah Yunani tertinggi jika dibandingkan dengan Negara anggota *Eurozone* (Zona Eropa) yang lain. Ketiga, perekonomian yang tidak kompetitif berimplikasi pada performa ekonomi Yunani. Keempat, rendahnya manajemen fiskal rezim-rezim pemerintah yang pernah berkuasa di Yunani. Ketidakmampuan kebijakan fiskal pemerintah Yunani untuk menyeimbangi kebijakan moneter ECB menjadi salah satu faktor semakin memburuknya krisis. Untuk menganalisa faktor-faktor penyebab terjadinya Krisis Ekonomi Yunani, maka dapat diklasifisikan ke dalam dua kategori, yaitu faktor internal yang berasal dari sistem, pemerintah, dan masyarakat Yunani dan faktor eksternal yang berasal dari sistem internasional. Kedua kategori faktor dapat dilihat dari berbagai perspektif, baik ekonomi, sosial, maupun politik:

A. Faktor Internal

Secara ekonomi, sebelum bergabung dengan *Eurozone* (Zona Eropa) pemerintah Yunani sudah boros dalam hal anggaran. Setelah mengadopsi *euro*

sebagai mata uang, pengeluaran publik justru semakin meningkat. Selain itu, Yunani lebih banyak melakukan impor daripada melakukan ekspor. Pengeluaran pemerintah Yunani merupakan salah satu pengeluaran terbesar jika dibandingkan dengan negara anggota *Eurozone* (Zona Eropa) yang lain. Akan tetapi, pengeluaran dalam jumlah yang besar tidak diiringi dengan pemasukan yang besar. Akibatnya, neraca anggaran Yunani selalu mengalami ketidakseimbangan.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan pemerintah Yunani memiliki pengeluaran yang besar. Salah satunya adalah dikarenakan lemahnya kerangka anggaran Yunani, yang disebabkan oleh kurangnya transparansi dan akuntabilitas, kurangnya kerangka anggaran yang bersifat jangka menengah, tidak adanya anggaran program yang mendetail, dan kurangnya koordinasi antar lembaga publik Yunani dalam hal anggaran. Di sektor perbankan, bank negara banyak memberikan subsidi untuk bisnis yang kurang menghasilkan *profit* (keuntungan). Pemerintah Yunani juga banyak menghabiskan anggaran untuk melakukan pembangunan infrastruktur yang tidak menciptakan produktivitas berkelanjutan, contohnya adalah pembangunan infrastruktur untuk Olimpiade 2004. Pemerintah juga menghabiskan banyak anggaran untuk militer. Pada tahun 1970an, anggaran tahunan pemerintah Yunani untuk militer berkisar 5,8% dari total PDB, 6,2% pada tahun 1980an, 4,6% pada tahun 1990an, dan 3,1% sepanjang tahun 2000-2008. Yunani adalah negara yang mengeluarkan biaya pertahanan terbesar kedua di NATO, setelah Amerika Serikat, dan tertinggi di Uni Eropa (Kouretas & Prodomos, 2010:22-24).

Selain itu, sektor publik Yunani tumbuh dengan ketidakefisiensian, karena memperkerjakan terlalu banyak orang. Setiap tahunnya upah dan dana pensiun pegawai sektor publik dinaikkan. Jumlah alokasi dana untuk gaji pemerintah naik hampir 100% sepanjang tahun 2005-2012, yaitu menjadi 27 juta *euro* atau 11,4% dari total PDB. Padahal di periode yang sama, nominal PDB hanya bertumbuh 74%. Di tahun 2012, gaji pegawai pemerintah naik lagi sebesar 7,5% menjadi 29 juta *euro* atau sekitar 12,4% total PDB. Dana pensiun Yunani adalah 95,7% dari total pendapatan sepanjang hidup pegawai. Dana pensiun Yunani merupakan yang tertinggi di wilayah *Eurozone* (Zona Eropa). Sebagai perbandingan, dana pensiun di Jerman adalah 60,8% dari total pendapatan sepanjang hidup. Selain itu, batas usia pensiun pegawai sektor publik Yunani adalah 58 tahun. Jika dibandingkan dengan negara Eropa lainnya, standar ini rendah. Batas usia pensiun di Jerman berkisar 65-67 tahun (Kouretas & Prodomos, 2010:22-24).

Secara politik, faktor yang menyebabkan krisis ekonomi di Yunani adalah korupsi. Yunani dikenal sebagai tempat lahirnya demokrasi modern. Akan tetapi, praktik korupsi yang marak terjadi sama sekali tidak mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi. Akibat praktik korupsi, setiap tahunnya pemerintah Yunani diestimasikan merugi sebesar 8% dari jumlah PDB. Yunani adalah negara dengan tingkat tertinggi dalam permasalahan korupsi di Eropa, khususnya di *Eurozone* (Zona Eropa). Di dalam tabel di bawah ini dijelaskan bahwa Yunani berada diurutan ke 73 bila dibandingkan dengan Negara-negara anggota Uni Eropa sebagai berikut:

Tabel 3.2
Peringkat Tingkat Korupsi Negara Anggota *Eurozone* Tahun 2009-2012

Peringkat	Negara	Skor CPI	Peringkat	Negara	Skor CPI
6	Finlandia	8,9	27	Cyprus	6,6
7	Belanda	8,9	28	Estonia	6,6
13	Luksemburg	8,2	29	Slovenia	6,6
14	Jerman	8	33	Spanyol	6,1
15	Irlandia	8	35	Portugal	5,8
16	Austria	7,9	45	Malta	5,2
21	Belgia	7,1	60	Slovakia	4,5
23	Perancis	6,9	63	Italia	4,3
			73*	**Yunani**	**3,8**

***Negara dengan tingkat korupsi tertinggi (semakin tinggi peringkat suatu Negara, semakin tinggi kasus korupsinya).

Sumber**:** *Transparency International, Corruption Perceptions Index*

Menurut *Transparency International* CPI, Yunani berada diurutan ke 73 dengan skor 3,8 yang dimana dijelaskan bahwa semakin tinggi peringkat suatu Negara, semakin tinggi kasus korupsi di Negara tersebut. Bila dibandingkan dengan Negara-negara Eropa Timur seperti Finlandia atau Belanda persentase skor CPI kedua Negara tersebut sebesar 8,9 dikarenakan sistem pemerintahan dan hukum yang diterapkan kedua Negara tersebut tidak memiliki keimunitasan pada pemerintahan, sehingga Hukum harus berjalan semestinya tanpa ada kekebalan bagi mereka yang melanggar.

Akan tetapi, struktur dari sistem politik Yunani sendiri membuat pemberantasan korupsi sulit dilakukan. Pada bab 3 pasal 62 konstitusi Yunani dijelaskan bahwa:

> "Selama dalam menjalankan sistem parlemen pemerintahan Yunani yang mengatur tentang hak dan kewajiban anggota parlemen Yunani, konstitusi memberikan hak imunitas kepada anggota parlemen, sehingga politisi tidak bisa ditangkap, dipenjara, atau diproses secara hukum tanpa melalui persetujuan parlemen" (Kouretas & Prodromos, 2010:35).

B. Faktor Eksternal

Selain disebabkan oleh faktor-faktor internal yang ada di Yunani, Krisis Ekonomi yang terjadi juga disebabkan oleh beberapa faktor-faktor eksternal. Salah satunya adalah kondisi perekonomian global. Krisis finansial global yang terjadi pada tahun 2008 memengaruhi seluruh perekonomian negara di dunia, tidak terkecuali Yunani. Dampak yang dapat dirasakan dari krisis finansial global adalah rendahnya tingkat aliran investasi akibat berkurangnya jumlah simpanan dan kurangnya kepercayaan *investor*. Yunani sudah memiliki akumulasi hutang yang banyak sejak beberapa tahun silam. Akan tetapi, akumulasi hutang yang dimiliki berubah menjadi krisis hutang pada tahun 2009 karena didorong krisis finansial global tahun 2008, yang menyebabkan defisit Yunani bertambah besar karena nilai pinjaman Yunani bertambah, sehingga Yunani semakin tidak sanggup untuk membayar hutang. Tidak hanya Yunani yang mengalami penurunan kondisi perekonomian, hampir seluruh negara di dunia, termasuk negara-negara besar di Eropa mengalami penurunan kondisi perekonomian. Karena sistem perekonomian Uni Eropa, khususnya *Eurozone* (Zona Eropa) saling terkait satu sama lain, maka ketika suatu *economic shock* (penurunan ekonomi) melanda sistem tersebut, maka tidak mengherankan apabila negara-negara di dalamnya juga ikut terkena pengaruhnya (Athanassiou, 2009:40).

Faktor eksternal lainnya yang memicu Krisis Ekonomi Yunani adalah spekulasi pasar. Akibat spekulasi bahwa Yunani tidak sanggup membayar pinjaman, timbul kepanikan di pasar kapital. Para *investor* segera menarik investasi mereka dari Yunani. Padahal dalam kondisi defisit dan untuk mendorong

pertumbuhan, investasi sangat dibutuhkan oleh suatu negara. Sepanjang tahun 2009, *rating* nilai obligasi dan aset bank Yunani terus turun. Pemberian *rating* pada nilai obligasi dan aset perbankan Yunani oleh badan-badan *rating* adalah salah satu faktor yang memunculkan spekulasi.

Krisis Ekonomi yang terjadi di Yunani juga menyiratkan betapa sulitnya sistem internasional bagi negara-negara dengan struktur ekonomi lemah seperti Yunani. Setelah bergabung dengan *Eurozone* (Zona Eropa), jumlah hutang Yunani justru semakin membengkak. Hal ini disebabkan adanya kemudahan dalam melakukan pinjaman bagi negara-negara anggota *Eurozone* (Zona Eropa). Banyaknya likuiditas yang beredar di pasar keuangan sebagai implikasi dari ECB membuat permintaan terhadap likuiditas terus meningkat. Permintaan ini yang kemudian menghasilkan tingginya keinginan untuk melakukan kredit. Yang menjadi masalah adalah, kecenderungan akan berhutang ini tidak diikuti dengan kemampuan Yunani membayar hutang. Selain itu, di samping mendorong keinginan untuk melakukan pinjaman, tingkat suku bunga yang rendah, bahkan negatif, juga menjadikan keinginan untuk berinvestasi rendah. Hal ini lah yang menciptakan ketidakseimbangan yang berkepanjangan dari anggaran Yunani (Athanassiou, 2009:48).

Selain itu, *Eurozone* (Zona Eropa) memberi akses yang sama bagi negara anggota untuk mengakses pasar modal untuk melakukan pinjaman, namun tidak memberi akses yang sama bagi negara anggota untuk menjual sekuritas. Pada awal terjadinya krisis finansial global tahun 2008, ECB, sebagai bank sentral *Eurozone* (Zona Eropa), mengambil kebijakan perpanjangan fasilitas kredit dan

likuiditas. Kebijakan likuiditas yang dilakukan ECB ini berhasil membantu merevitalisasi bank-bank swasta, namun berdampak pada sulitnya pemerintah untuk menerbitkan obligasi, sehingga permintaan pasar terhadap sekuritas negara pun berkurang. Pasar pun lebih memilih untuk membeli sekuritas dari negara yang lebih murah dan aman.

Hal ini lah yang menimpa Yunani ketika berusaha memasuki pasar modal untuk menjual obligasi agar bisa menutup hutang, kepercayaan pasar terhadap obligasi Yunani sudah berkurang, namun harus ditambah bersaing dengan sekuritas negara anggota *Eurozone* (Zona Eropa) yang lain yang lebih murah dan lebih aman, seperti Jerman. Akhirnya obligasi Yunani tidak laku di pasar modal. Kebijakan moneter yang diberlakukan di *Eurozone* (Zona Eropa) terkadang hanya menguntungkan bagi negara-negara anggota dengan perekonomian besar, namun merugikan bagi negara periferi, seperti Yunani. Kebijakan moneter yang diambil ECB sering disetir agar menguntungkan perekonomian negara besar seperti Jerman. Misalnya adalah kebijakan *key interest rate* (suku bunga satuan) yang dilakukan ECB pada tahun 2004-2005, dimana suku bunga dinaikkan hanya sebesar 0,25%. Hal ini sangat berbeda dengan kenaikan-kenaikan selanjutnya yang cukup ekstrim. Rendahnya tingkat suku bunga ini ternyata ditujukan untuk memulihkan perekonomian Jerman. Pemulihan ekonomi Jerman melalui tingkat suku bunga yang cenderung rendah ini berdampak negatif bagi negara-negara yang sedang meningkatkan pertumbuhan ekonominya, seperti Yunani dan negara periferi lainnya. Negara-negara tersebut membutuhkan tingkat suku bunga yang

tinggi untuk menarik investasi dan mengontrol inflasi (Clark, Heather & Moya, 2010: 37).

Uni Eropa telah menciptakan sistem ekonomi yang salah bagi Negara-negara anggotanya, dimana sistem ini lebih banyak memberikan keuntungan bagi Jerman sebagai pemain utama di Uni Eropa. Yunani dahulu pernah menjadi negara yang kaya, namun karena sistem ekonomi yang salah, yang telah diciptakan oleh Uni Eropa, Yunani terpaksa mengikuti aturan dari Uni Eropa. Pasar ekspor Uni Eropa banyak didominasi oleh Jerman, sedangkan negara-negara anggota lain hanya menjadi klien untuk menguntungkan ekonomi Jerman, yang direpresentasikan melalui kepentingan Uni Eropa. Yunani sebenarnya kaya akan hasil produk agrikultur, seperti lemon, kentang, dan bawang, yang seharusnya bisa diekspor untuk menambah devisa. Namun, Uni Eropa justru mematikan bisnis domestik negara anggota yang dianggap tidak bersifat produk dengan keunggulan kompetitif bagi Uni Eropa, sehingga negara periferi seperti Yunani menjadi tidak produktif dan hanya menjadi importir. Yunani mengimpor lemon dari Argentina, kentang dari Mesir, dan bawang dari China. Inilah yang disebut sebagai dampak *trade diversion* (pengalihan perdagangan) dari terbentuknya *custom union* (serikat pabean). Dimana Yunani yang tadinya efisien pada produk-produk tertentu terpaksa menjadi mengalami kerugian (Wawancara dengan Attase Kedutaan Besar Yunani di Jakarta).

Kelemahan Uni Eropa yang lain yang memicu terjadinya Krisis Ekonomi Yunani adalah Uni Eropa kurang tegas dalam mengontrol jumlah pinjaman yang dimiliki oleh negara anggotanya, khususnya negara anggota *Eurozone* (Zona

Eropa) yang melewati batas standar yang ditetapkan oleh SGP. ECB sebagai pemegang otoritas pembuat kebijakan moneter tidak diberi otoritas untuk mengontrol dan kebijakan fiskal dan perbankan negara anggota. Yunani telah melanggar standar yang telah ditetapkan oleh SGP dari sejak Yunani bergabung dengan *Eurozone* (Zona Eropa). Sebenarnya negara anggota *Eurozone* (Zona Eropa) yang melanggar standar SGP bukan hanya Yunani. Negara yang pertama kali melanggar SGP juga adalah Jerman, lalu diikuti oleh Perancis. Namun, ketika negara ini melanggar SGP, tidak dikenakan sanksi. Oleh karena itu, tidak heran apabila negara periferi, termasuk Yunani, mencontoh tindakan dari negara-negara besar ini, karena melihat ketidakadaan sanksi dan pada akhirnya SGP hanya bersifat normatif (Athanassiou, 2009:50).

Tabel 3.3
Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Krisis Ekonomi Yunani

<table>
<tr><th>Faktor Internal</th><th>Faktor Eksternal</th></tr>
<tr><td>Membengkaknya sektor pengeluaran publik</td><td rowspan="5">Krisis finansial global

Pemberian rating yang rendah bagi nilai obligasi dan aset bank Yunani

Spekulasi pasar

Akses pinjaman yang mudah dari Uni Eropa sehingga mendorong Yunani terus melakukan pinjaman

Kebijakan ekonomi Uni Eropa, khususnya kebijakan moneter ECB yang lebih menguntungkan Negara-negara besar, khususnya Jerman dibanding negara periferi

Kurang tegasnya kontrol dari Uni Eropa kepada negara yang melanggar standar Stability and Grow Pact (Pakta Pertumbuhan dan Stabilitas).</td></tr>
<tr><td>a) Manajemen Kerangka anggaran yang lemah
b) Jumlah sektor pegawai yang lebih.
c) Tingginya upah dan dana pensiun
d) Pembangunan yang tidak menciptakan produktivitas berkelanjutan
e) Bank Negara terlalu banyak member subsidi untuk bisnis yang tidak menguntungkan
f) Tingginya konsumsi melalui impor</td></tr>
<tr><td>Rendahnya produktivitas dan daya saing sektor industri dan perdagangan Yunani</td></tr>
<tr><td>Rendahnya anggran pendapatan</td></tr>
<tr><td>a) Manajemen sistem pajak yang buruk
b) Banyaknya praktik penghindaran pajak
c) Rendahnya ekspor</td></tr>
<tr><td>Budaya korupsi yang mengakar</td><td rowspan="2">Ketidakmampuan rezim pemerintah yang berkuasa untuk mengembalikan kepercayaan pasar dan mengumpulkan dana dari pasar kapital</td></tr>
</table>

Sumber: *Greece Timeline – Economic Crisis*

3.1.2.2.4 Dampak-dampak Krisis Ekonomi Yunani

Dampak dari krisis ekonomi Yunani telah mengakibatkan perekonomian Yunani mengalami penurunan baik dalam bidang impor, ekspor, pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran serta meningkatnya Rasio utang PDB. Adapun

penjelasan dari dampak-dampak krisis ekonomi terhadap perekonomian Yunani dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Rasio Utang terhadap PDB

Rasio utang terhadap PDB Yunani terakhir dilaporkan berada pada level 157,20%. Dari tahun 2008-2013, rata-rata rasio utang Yunani terhadap PDB adalah 65,62%. Rekor tertinggi dalam sejarah Yunani mencapai 170,30% pada bulan Desember 2012 dan rekor terendah 112,90% pada bulan Desember 2009. Umumnya, rasio utang terhadap PDB digunakan oleh investor sebagai persentase untuk mengukur kemampuan Yunani melakukan pembayaran utangnya di masa yang akan datang, sehingga mempengaruhi besarnya pinjaman Yunani dan hasil obligasi.

Berikut ini adalah Gambar yang menunjukkan angka rasio utang terhadap PDB Yunani dari tahun 2008-2013:



Sumber: (http://www.tradingeconomics.com/greece/government-debt-to-gdp, diakses 27 Maret 2014).

Gambar 3.2
Rasio Utang PDB Yunani (2008-2013).

2. Pertumbuhan Ekonomi

Selain utang negaranya yang tinggi, pertumbuhan ekonomi Yunani juga relatif rendah dimana dari tahun 2000-2007 sebelum krisis hanya sekitar 4,2%, walaupun angka tersebut merupakan angka tertinggi di zona *Euro* sebagai hasil dari membanjirnya modal asing ke negara tersebut. Apalagi setelah diterpa krisis ekonomi yang berkepanjangan bisa dipastikan pertumbuhan ekonominya kurang dari angka tersebut. Sebagai akibatnya, pemerintah Yunani akan memecat 15 ribu pegawai negerinya dan memotong upah minimum hingga 20% dari 751 *Euro* menjadi 600 *Euro* yang tentunya akan semakin berakibat buruk pada tingkat pengangguran di Yunani yang telah mencapai 21%.

Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan angka pertumbuhan ekonomi Yunani dari tahun 2009-2013:

Tabel 3.4
Pertumbuhan Ekonomi Yunani (2009-2013)

Tahun	Persentase
2009	-2,0%
2010	-4,5%
2011	-5,0%
2012	-2,0%
2013	1%

Sumber : (http://www.tradingeconomics.com/greece/gdp-growth diakses 29 April 2014).

3. Ekspor

Ekspor Yunani pada bulan Januari 2011 adalah senilai $ 1,539 juta. Komoditas ekspor utama Yunani adalah adalah buah, sayuran, minyak zaitun, tekstil, baja, aluminium, semen, dan berbagai jenis barang manufaktur seperti

pakaian, makanan, minyak bumi olahan dan produk berbasis minyak bumi. Adapun negara yang menjadi mitra ekspor Yunani beserta nilai ekspornya pada tahun 2013 adalah Jerman (10,9%), Italia (10,9%), Inggris (10,9%), Cyprus (7,3%), Bulgaria (6,5%), Turki (5,4%), Belgium (5,1%), China (4,8%), Switzerland (4,5%), Polandia (4,2%).

Berikut ini adalah gambar yang menunjukkan nilai ekspor Yunani dari tahun 2011 - awal 2014 dalam juta *Euro*/bulan:



Sumber: (http://www.tradingeconomics.com/greece/exports diakses 20 Maret 2014).

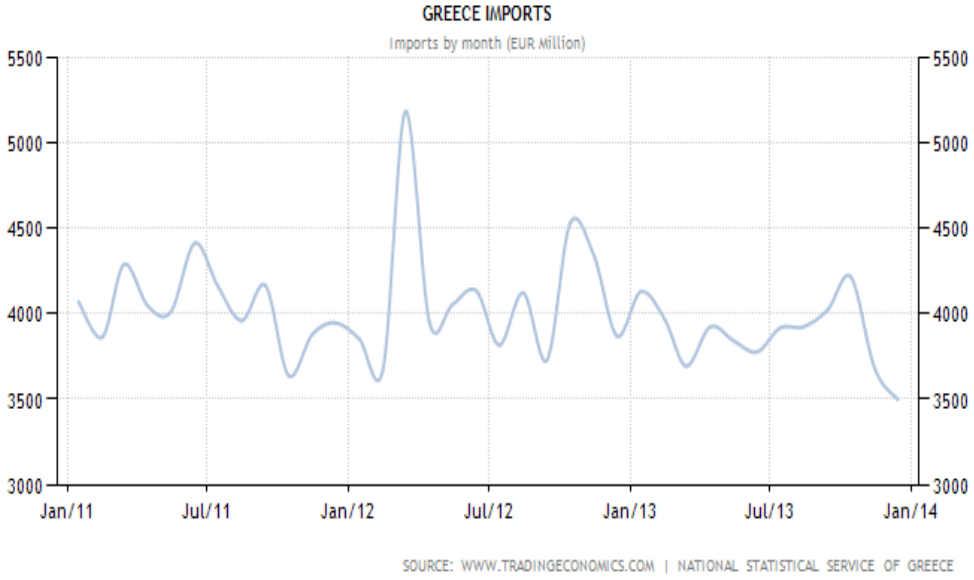
Gambar 3.3
Nilai Ekspor Yunani (2011-2014)

4. Impor

Impor Yunani pada bulan Januari 2011 adalah senilai senilai $ 4.107 juta. Komoditas impor utama Yunani adalah barang-barang industri seperti mesin, bahan bakar, bahan kimia, barang modal, bahan makanan, dan minyak bumi. Mitra impor utama Yunani pada tahun 2013 adalah anggota Uni Eropa

(Jerman 10,6%, Italia 9,9%, Belanda 5,3%, Perancis 4,9%, Austria 4,5%), Rusia 9,6% dan China 6,1%.

Berikut ini adalah gambar yang menunjukkan nilai impor Yunani dari tahun 2011 - awal 2014 dalam juta *Euro*/bulan:



Sumber: (http://www.tradingeconomics.com/greece/imports diakses pada 20 Maret 2014).

Gambar 3.4
Nilai Impor Yunani (2011-2014)

5. Tingkat Pengangguran

Pada Juli 2012, tingkat pengangguran di Yunani terakhir dilaporkan berada di angka 21,9%. Dari tahun 2012-2013, tingkat rata-rata pengangguran Yunani sebanyak 5,93%. Dalam sejarah Yunani, angka tertinggi mencapai angka 27,6% pada Juli 2013 dan rekor terendah 21,9% pada bulan Juli 2012.

Berikut ini adalah gambar yang menunjukkan tingkat pengangguran di Yunani dari tahun 2012-2014 dalam persen (%):



Sumber: (www.tradingeconomics.com/hellenic-statistical-authority diakses 20 Maret 2014).

Gambar 3.5
Tingkat Pengangguran Yunani (2012-2014)

Dampak dari krisis ekonomi Yunani telah mengakibatkan perekonomian Yunani mengalami penurunan baik dalam bidang impor, ekspor, pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran serta meningkatnya Rasio utang PDB. Oleh karena itu, Pemerintah Yunani harus mampu memperbaiki perekonomian Yunani dan menerapkan program-program yang dapat memberikan dampak positif dalam perkembangan perekonomian yang datang, bila dilihat dari dampak yang dialami Yunani, Uni Eropa harus dapat mengatasi dan memberikan penanganan dalam

perekonomian Yunani agar dampak tersebut tidak memberikan efek yang buruk bagi negara-negara anggota Uni Eropa yang lain.

3.2 Metode Penelitian

3.2.1 Desain Penelitian

Untuk melakukan sebuah penelitian, diperlukan sebuah desain atau rancangan yang berisi rumusan tentang objek yang akan diteliti. Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian deskriptif analisis kualitatif. Merujuk pada permasalahan yang diangkat serta variabel yang tersedia, maka peneliti hanya melakukan analisa data berdasarkan data-data serta informasi yang dikeluarkan oleh Uni Eropa dan Pemerintah Yunani dan diimplementasikan dengan teori-teori dalam kajian Hubungan Internasional.

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis kualitatif melalui pendekatan sistem, yang didukung oleh teknik pengumpulan data: Studi Kepustakaan, Penelusuran data online, Dokumentasi, dan Wawancara. Hal ini dikarenakan penelitian ini difokuskan pada peran suatu organisasi internasional dalam mengatasi permasalahan di Yunani dengan mengolah data-data yang diperoleh dari sumber yang relevan secara mendalam:

a. Studi Kepustakaan, Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik kepustakaan dengan menelaah teori, opini, membaca buku, jurnal serta karya ilmiah yang relevan dengan masalah yang diteliti.
b. Penelusuran Data Online**,** dalam penelitian ini peneliti memanfaatkan data informasi berupa informasi data maupun teori, secepat dan semudah mungkin dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan layanan internet dengan cara mengakses alamat situs yang terkait dengan segala informasi yang berkaitan dengan Peranan Uni Eropa dalam Mengatasi Krisis Ekonomi Yunani.
c. Metode Dokumentasi, yakni mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya. Dokumen bisa berbentuk tulisan atau gambar mengenai Peranan Uni Eropa dalam Mengatasi Krisis Ekonomi Yunani.
d. Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan berita, data atau fakta untuk memperoleh keterangan. Pelaksanaannya bisa secara langsung, bertatap muka (*face to face*) dengan orang yang akan diwawancarai atau bisa secara tidak langsung dengan memanfaatkan akses teknologi melalui telepon, internet dan sebagainya. Dalam hal ini, peneliti berencana mewawancarai narasumber terkait masalah yang akan diteliti. Salah satu narasumber yang terkait yaitu Perwakilan Staff Uni Eropa serta Perwakilan Staff Kedutaan Besar Yunani yang ada di Jakarta untuk

mengetahui apa saja yang sudah dilakukan Uni Eropa serta pemerintah Yunani dalam Mengatasi Krisis Ekonomi itu sendiri.

3.2.3 Teknik Penentuan Informan

Teknik Penentuan informan yang dipakai peneliti adalah dengan menggunakan teknik penentuan *Purposive*. Yaitu peneliti menentukan pihak-pihak informan berdasarkan tujuan, masalah dan variabel penelitian. Metode yang digunakan adalah metode wawancara sesuai dengan masalah yang akan diteliti. Berkaitan dengan Peranan Uni Eropa yaitu dalam hal ini peneliti berencana bertemu dengan narasumber yang menjadi salah satu Staff Uni Eropa dan Perwakilan Staff pemerintah Yunani di Indonesia. Untuk mengetahui peranan Uni Eropa serta perkembangan perekonomian Yunani setelah mendapatkan bantuan dari Uni Eropa, peneliti menentukan informan dari pihak Uni Eropa yang merupakan salah satu perwakilan dari organisasi yang mengatasi krisis ekonomi Yunani.

3.2.4 Teknik Analisa Data

Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti menganalisis data dengan menggunakan teknik reduksi data. Artinya, data-data yang diperoleh, baik melalui studi pustaka, penelusuran online dan wawancara, digunakan sesuai dengan keperluan penelitian berdasarkan dengan tujuan penelitian. Hal ini bertujuan agar data yang digunakan berkorelasi dengan perumusan masalah yang telah dibuat. Penyajian Data, peneliti menyajikan data-data yang diperoleh dari hasil meneliti

dan wawancara atau dari sumber-sumber internet sesuai dengan kebutuhan. Penarikan kesimpulan, peneliti menarik kesimpulan dari beberapa data yang disajikan baik data primer atau sekunder yang didapatkan dari beberapa informan yakni Pihak Perwakilan Staff Uni Eropa dan pihak Perwakilan Pemerintah Yunani untuk Indonesia.

3.2.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.5.1 Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti memperoleh data dan informasi yang bersumber dari berbagai tempat di bawah ini sesuai dengan kebutuhan penelitian, diantaranya:

a. *Greek Embassy* (Kedutaan Besar Yunani) Jakarta Plaza 89 12th Floor Suite 1203, Jl. HR. Rasuna Said Kav. X-7 No. 6 Jakarta 12940, Indonesia
b. Delegasi Uni Eropa Untuk Indonesia, Brunei Darussalam dan ASEAN Jakarta Wisma Dharmala sakti, 16th Floor Jl. Jenderal Sudirman Kav.32 Jakarta 10064
c. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Bagian Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah, Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 10 Jakarta Pusat.
d. Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia Jl. Dipatiukur no 114-116 Bandung, Jawa Barat, Indonesia
e. Perpustakaan Universitas Katholik Parahyangan Jalan Cimbuleuit 94, Bandung 40141 Indonesia

3.2.5.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam kurun waktu delapan bulan terhitung dari bulan Januari sampai dengan bulan Agustus 2014, hal ini dapat dilihat dalam tabel dibawah ini, sebagai berikut:

Tabel 3.5
Waktu Penelitian

	Kegiatan	Waktu Penelitian							
		Tahun 2014							
		Jan	**Feb**	**Mar**	**Apr**	**Mei**	**Jun**	**Jul**	**Aug**
1	Pengajuan Judul								
2	Pembuatan Usulan Penelitian								
3	Seminar Usulan Penelitian								
4	Bimbingan								
5	Pengumpulan Data dan Pengolahan Data								
6	Sidang								